

ABSTRAK

Plan de Acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024) merupakan upaya Spanyol dalam mengikuti agenda kebijakan luar negeri feminis Swedia dengan mengintegrasikan tujuan kesetaraan gender ke dalam praktik kebijakan luar negerinya, termasuk penanganan kekerasan berbasis gender. Namun, Spanyol menunjukkan kelemahan dalam implementasi, transparansi, dan konsistensi, yang mengakibatkan berlanjutnya kekerasan berbasis gender di Spanyol dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan teori feminisme pasca-kolonial untuk mengkritisi kebijakan tersebut serta konsep kebijakan luar negeri feminis dan *Machismo* untuk menganalisis implementasi *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista* (2023-2024) terkait kekerasan berbasis gender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatif, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan kebiasaan patriarkal yang diwarisi Spanyol telah merasuki struktur pemerintahan Spanyol, yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut dalam implementasi *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista* (2023-2024) terkait kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender masih tetap ada karena nilai-nilai patriarki yang mengakar dan dinormalisasi melalui fenomena *Machismo* yang menciptakan masyarakat yang bersifat patriarki.

Kata Kunci: *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista*, Feminisme Pasca-Kolonial, *Machismo*, Spanyol.

ABSTRACT

Plan de Acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024) is Spain's effort in following Sweden's feminist foreign policy agenda by integrating gender equality goals into its foreign policy practice, including addressing gender-based violence. However, Spain shows shortcomings regarding its implementations, transparency, and consistency which resulted in the persistence of gender-based violence in Spanish and the European Union. This study uses postcolonial feminist theory to critique the policy as well as feminist foreign policy and Machismo as concepts to analyze the implementation of the Plan de Acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024) regarding gender-based violence. The research method used to conduct this research is explanatory qualitative methods, using primary and secondary sources through document studies. The result of this study shows that Spain's inherited patriarchal values and habits have penetrated Spain's structural government which resulted in the continued gender inequality in the Plan de Acción para la Política Exterior Feminista (2023-2024) implementation regarding gender-based violence. Therefore, gender inequalities still persist as rooted patriarchal norms are normalized through Machismo, which creates societal structures that remain patriarchal.

Keywords: *Plan de Acción para la Política Exterior Feminista, Postcolonial Feminism, Machismo, Spain.*